

## Strategi Empat Konsensus Kebangsaan Bagi Pembangunan Generasi Muda Dalam Menyongsong Bonus Demografi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat Kepulauan Riau

*Bambang Soesatyo*

Universitas Borobudur, Indonesia

email: bambangsoesatyo@borobudur.ac.id

Dikirim; 15-03-2024 Direvisi; 03-04-2024 Diterima: 06-04-2024

### ABSTRACT

*The Demographic Bonus presented a golden opportunity for the Indonesian. However, with the social issues arising from the limited workforce in the Riau Islands due to the phenomenon of human capital flight, this opportunity was under threat. Through the reconstruction of the Four Consensuses of Nationalism, the strengthening of the younger generation was carried out as a preventive measure and to increased public understanding of the dangers of Human Trafficking. The aim of this research was to analyzed the implementation of the Four Consensuses of Nationalism strategy for the development of the younger generation in anticipation of the Demographic Bonus and its implications for the community social resilience of the Riau Islands.*

*Using a qualitative descriptive approach, the research informants included academics, community leaders, youth leaders, government and private sector employees, and students. Informant selection was based on purposive sampling, targeting individuals involved in the execution, education, and utilization of human resources in the Riau Islands. Data collection methods included structured interviews, FGD, observation, and document analysis. Data verification was conducted through triangulation of sources and methods. Data analysis involved data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The research findings indicated that the Government of the Riau Islands was striving to implement the Four Consensuses Strategy to strengthened the supporting values of the demographic bonus. However, the socialization of the Four Consensuses of Nationalism needed improvement, especially among teachers and community leaders. The implications of the Four Consensuses of National Resilience strategy on social resilience tend towards the reinforcement of awareness, thereby fostering societal actions aimed at mitigating threats. This was evident in the protection of vulnerable communities through the establishment of Trauma Center Protection Houses. Social networks involved the Task Force for the Prevention of Trafficking in Persons and Provincial Task Forces. Conflict resolution based on the Four Consensuses Strategy involved active communication and legal approaches.*

**Keywords:** *Four Consensuses of the Nation, Demographic Bonus, Community Social Resilience, Riau Islands.*

### ABSTRAK

Bonus Demografi merupakan kesempatan emas bagi Bangsa Indonesia. Akan tetapi dengan masalah sosial yang ada akibat keterbatasan angkatan kerja di Kepulauan Riau karena fenomena *human capital flight*, kesempatan tersebut pun terancam. Melalui rekonstruksi Empat Konsensus Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) penguatan generasi muda dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi strategi Empat Konsensus Kebangsaan bagi pembangunan generasi muda dalam menyongsong bonus demografi dan implikasinya terhadap ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Riau.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, informan penelitian ini melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pegawai negeri dan swasta; dan siswa. Pemilihan informan didasarkan *purposive sampling* yang berposisi sebagai pelaksana, pendidik dan pengguna sumber daya manusia di Kepulauan Riau. Metode pengumpulan menggunakan wawancara struktural, FGD, observasi serta studi dokumen. Verifikasi data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data dimulai dengan reduksi data dilanjutkan dengan pengajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kepulauan Riau berupaya mengimplementasikan Strategi Empat Konsensus untuk menguatkan nilai-nilai pendukung bonus demografi. Namun, sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan perlu ditingkatkan, terutama di kalangan guru dan tokoh masyarakat. Implikasinya Strategi Empat Konsensus Kebangsaan terhadap ketahanan sosial cenderung ke penguatan kesadaran sehingga tercipta tindakan-tindakan di masyarakat untuk mereduksi ancaman. Hal terlihat dalam perlindungan terhadap masyarakat rentan dalam wujud Rumah Perlindungan Trauma Center. Jaringan sosial melibatkan Satgas TPPO dan Gugus Tugas Provinsi. Resolusi konflik berbasis Strategi Empat Konsensus melibatkan komunikasi aktif dan pendekatan hukum.

***Kata Kunci: Empat Konsensus Kebangsaan, Bonus Demografi, Ketahanan Sosial Masyarakat, Kepulauan Riau.***

## **PENGANTAR**

Aspek sosial telah menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan negara. Kondisi sosial yang baik dapat menciptakan stabilitas di dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial dan keadilan membantu mencegah konflik sosial, kerusuhan, dan ketidakstabilan politik yang dapat menghambat proses pembangunan (Syafar, 2017). Kestabilan sosial bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dan kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Melalui peran sertanya masyarakat pun dapat secara mandiri menciptakan ketahanan sosial masyarakat di kawasannya. Menurut penelitian oleh Friedhelm Betke, masyarakat yang memenuhi standar ketahanan sosial masyarakat yang efektif didefinisikan oleh tiga kriteria utama. *Pertama*, masyarakat tersebut mampu dengan efektif melindungi anggotanya yang berada dalam kondisi rentan terhadap perubahan sosial dan berbagai ancaman yang mungkin timbul. *Kedua*, masyarakat yang memiliki ketahanan sosial mampu melakukan investasi sosial dalam pembentukan jaringan sosial yang memberikan manfaat signifikan bagi keseluruhan masyarakat. *Ketiga*, kapasitas masyarakat untuk mengembangkan mekanisme operasional yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan

yang timbul dalam dinamika sosial masyarakat (Rahmawati, dkk., 2021).

Dalam era modern ini, pulau-pulau terluar menjadi perhatian dalam pembangunannya. Terlebih bagaimana Indonesia melalui konflik Pulau Sebatik dan Tawau beberapa waktu lalu. Perbatasan negara merupakan representasi penting dari kedaulatan suatu negara. Kawasan perbatasan memegang peran krusial dalam menetapkan batas wilayah yang mencerminkan kedaulatan, eksploitasi sumber daya alam, dan menjaga keamanan serta integritas wilayah di dalam suatu negara (Febrianti, dkk., 2020).

Kepulauan Riau, berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan nasional Indonesia. Kontrol yang efektif atas perbatasan ini mendukung upaya pengawasan dan pengamanan terhadap potensi ancaman keamanan. Selain itu posisinya yang mendekati Singapura dan Malaysia menimbulkan ancaman baru bagi sumber daya manusianya. Sejarah dan kebudayaan masyarakat pun menjadi permasalahannya. Dahulu Kepri Indonesia, Johor Malaysia dan Singapura merupakan kawasan serumpun, namun karena batas negara saat ini masyarakatnya pun terbatas dalam akses ke ketiganya. Hubungan interaksi

antar masyarakat di pulau-pulau tersebut telah berjalan selama berabad-abad. Pada masa pemerintahan Kerajaan Johor dahulu, yang dipimpin oleh Sultan dan dikenal sebagai Yang Dipertuan Besar (analogi dengan Presiden dalam konteks tersebut), keberadaan Yang Dipertuan Muda (mirip dengan Perdana Menteri dalam konteks saat ini) memegang peranan penting. Mereka berkedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat. Sejak Daeng Marewa pada tahun 1721 hingga tokoh-tokoh seperti Daeng Chelak, Daeng Kamboja, Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, dan seterusnya, hubungan sosial budaya telah dijaga dengan baik (Arybowo, 2009).

Sisi lain dari fenomena ini adalah dengan banyaknya masyarakat perbatasan yang memutuskan untuk bekerja di Malaysia dan Singapura dari pada di Kepulauan Riau atau kawasan lain di Indonesia. Terdapat kecenderungan rendahnya tingkat pengangguran di kalangan migran laki-laki dibandingkan dengan migran perempuan memiliki implikasi bahwa pasar tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau lebih memilih untuk mempekerjakan laki-laki daripada perempuan. Fenomena ini dapat diatributkan kepada ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau pada sektor industri, di mana sektor tersebut cenderung lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja laki-laki daripada perempuan (Kurniawan, 2019). Para perempuan Kepulauan Riau pun memilih untuk mengadu nasib di negeri lain sebagai Pekerja Migran Indonesia, karena sistemikanya yang dianggap sulit, para pemuda cenderung menggunakan akses ilegal dalam upayanya mencapai Malaysia dan Singapura.

Banyak pekerja migran yang dengan tekad tinggi menjalani perjalanan melintasi batas negara melalui jalur non-prosedural, baik

melalui darat maupun perairan, dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Fenomena ini paling sering teramati di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Secara khusus untuk Kepulauan Riau, pada periode tahun 2020 hingga 2023, terdokumentasi sebanyak 62 kasus, melibatkan 118 tersangka dan menimpa 546 korban. Sebagian besar kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPO) di Kepulauan Riau terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Peningkatan intensitas kegiatan PMI melalui jalur non-prosedural lintas batas negara disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya migrasi yang aman, termasuk risiko TPPO dan penyelundupan PMI secara ilegal. Faktor lain melibatkan kekurangan pengamanan di wilayah perbatasan, keterbatasan kapasitas petugas, serta adanya oknum petugas dan warga masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelundupan PMI secara ilegal melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Dampak dari migrasi non-prosedural PMI mencakup risiko keselamatan dan keamanan selama perjalanan, terutama karena korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban migrasi ilegal (Kesbangpol Kepri, 2023).

Peristiwa ini dinamakan *human capital flight* yang mana menjadi ancaman bagi proyeksi Bonus Demografi di Indonesia. *Human capital flight* menggambarkan peningkatan signifikan dalam jumlah individu yang sangat terampil meninggalkan suatu wilayah geografis, yang dalam banyak kasus adalah negara asal mereka, menuju lokasi yang sepenuhnya berbeda. Globalisasi telah banyak membantu pergerakan ini ke negara-negara maju di dunia. Dampak migrasi yang meningkat terhadap pengembangan modal manusia tidak dapat diabaikan. Sementara

negara asal seperti di negara berkembang dapat mengalami kekurangan tenaga kerja terampil, negara tuan rumah mendapatkan manfaat lebih banyak melalui penambahan tenaga kerja terampil ke pasar tenaga kerjanya. Akibatnya, pengembangan modal manusia terus melemah bagi negara-negara berkembang. Memang, para pemangku kepentingan yang prihatin telah khawatir atas peningkatan emigrasi yang tak henti-hentinya karena hal ini mengakibatkan kerugian pada sumber daya negara dan lebih memburukkan kondisi kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, meskipun keuntungan bersih dari *human capital flight* bagi negara yang menjadi tujuan migrasi sering dianggap sebagai *brain gain*, nilai bersih dari tindakan tersebut dalam beberapa kasus dianggap sebagai *brain drain* bagi negara asal (Adeosun dan Popogbe, 2021).

Fenomena *human capital flight* sendiri akan sangat mempengaruhi diskursus Bonus Demografi ke depannya. Bonus Demografi di Indonesia sendiri diproyeksikan terjadi pada tahun 2030. Bonus Demografi adalah suatu keadaan dalam peradaban kependudukan suatu negara di mana terjadi peningkatan signifikan jumlah penduduk usia produktif. Hal ini dapat menjadi modal dasar yang sangat berharga dalam proses pembangunan (Umar, 2017). Namun, bagi Indonesia, fenomena Bonus Demografi menjadi suatu tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat. Ketidakmampuan menangani Bonus Demografi dengan baik dapat mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan dampaknya akan terasa di daerah. Penanganan Bonus Demografi merupakan suatu keharusan untuk mencegah potensi dampak negatif di masa depan (Sutikno, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang baik dan

komprehensif dalam menghadapi fenomena ini. Dampak ledakan jumlah penduduk usia produktif tidak hanya berdampak pada sektor kependudukan, tetapi juga merambah ke berbagai bidang lainnya seperti kesehatan, kesejahteraan, perekonomian, dan aspek-aspek lainnya.

Meskipun Bonus Demografi diproyeksikan 6 tahun lagi, namun penanganan migrasi manusia ini perlu dikendalikan dari sekarang. Bonus Demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat secara signifikan, menciptakan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Namun, ketika individu yang memiliki kualifikasi dan keterampilan tinggi memilih untuk bekerja atau menetap di luar negeri, hal ini dapat merugikan Bonus Demografi. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan kehilangan sumber daya manusia yang berpotensi menjadi modal dasar pembangunan, tetapi juga mengurangi kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi di negara asal. *Human capital flight* juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur demografi, karena yang tinggal di negara tersebut mungkin lebih dominan adalah kelompok yang kurang berkualifikasi. Kepulauan Riau pun mencoba untuk menggandeng dan mendampingi pemudanya dengan pendekatan yang lebih filosofis dengan menggunakan strategi pembangunan Empat Konsensus Kebangsaan. Dalam implementasinya upaya ini tidak selalu mulus, bagai berjuang di antara tekanan zaman, banyak pula fenomena-fenomena yang membayangkannya.

Empat Konsensus Kebangsaan merupakan dasar yang solid dengan tujuan untuk menjamin bahwa penduduk Indonesia dapat merasakan kenyamanan, keamanan,

ketenteraman, dan kesejahteraan, serta terhindar dari berbagai gangguan dan bencana. Analogi dapat dibuat bahwa konsensus-konsensus tersebut adalah elemen penopang utama suatu struktur untuk memastikan kestabilan. Ketika elemen penopang tersebut lemah, maka kestabilan struktur tersebut dapat mudah terganggu. Empat Konsensus ini juga dapat dianggap sebagai landasan kritis yang menentukan stabilitas suatu sistem. Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara mencerminkan sekumpulan nilai-nilai luhur yang wajib dipahami oleh seluruh anggota masyarakat, dan menjadi panduan dalam urusan pemerintahan guna mencapai tujuan menciptakan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terdiri dari: (1). Pancasila; (2). UUD 1945; (3). NKRI; dan (4). Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila adalah ideologi dasar dan filosofi negara Indonesia yang memiliki peran sentral dalam konstruksi identitas dan tatanan negara Indonesia. Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi Indonesia. Filosofi ini mencakup lima sila atau prinsip utama yang menggambarkan nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh warga negara Indonesia (Nurgiansah, 2021). Meskipun Pancasila dianggap sebagai pijakan penting dalam konstruksi identitas nasional Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ini masih terbatas di kalangan masyarakat. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, merangkum pandangan hidup (*way of life*), *filosofische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, dan

pemersatu bangsa (Asshiddiqie, 2020). Dari perspektif yuridis ketatanegaraan, Pancasila menunjukkan perannya sebagai dasar negara Republik Indonesia yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Proses reformasi diarahkan pada “*reinventing and rebuilding*” Indonesia dengan landasan hukum yang bersumber dari Pancasila (Fransisco, 2018). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber hukum negara yang utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hukum dasar tertinggi, mencakup seluruh struktur dan lembaga negara, serta hak-hak rakyat (Wirawan, 2022). Konstitusi ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan memiliki sejarah revisi, termasuk empat kali perubahan (amandemen) pada tahun 1999-2002 yang memperkuat pengaturan hak asasi manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagai negara kesatuan berbentuk republik. Pemahaman dan komitmen terhadap NKRI diperlukan dalam pembangunan karakter bangsa, mengembangkan karakter yang memperkuat komitmen terhadap NKRI, dan bukan karakter yang dapat menggoyahkan negara. Pengembangan karakter melibatkan pembangunan sikap demokratis dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, serta mencakup semua lapisan masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan Pasal 25A UUD 1945 dan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan bangsa Indonesia, mengapresiasi



perbedaan dan keragaman dengan tujuan tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memuat nilai sejarah panjang dan persamaan pengalaman dijajah oleh bangsa lain (Belanda dan Jepang) serta menghadapi pemberontakan dalam negeri. Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan (SARA) di Indonesia harus dianggap sebagai kekayaan sosio-kultural yang kodrati dan alamiah. Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjadi pendorong untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, dengan kesadaran bahwa perbedaan tidak harus mengakibatkan perpecahan. Kesadaran ini membawa pemahaman bahwa meskipun berbeda, tetapi masih bisa bersatu dan bergabung, mengartikan “Sekalipun Tidak Bersatu dalam Iman Tapi Bersatu dalam Kemanusiaan” (MPR RI, 2014).

Dari perspektif pemahaman mengenai negara kesatuan, terdapat tantangan yang jelas terkait pemahaman mengenai kesatuan dan keberagaman di dalamnya. Beberapa isu seperti otonomi daerah, konflik agama dan etnis, serta separatisme masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah, mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan signifikansinya dalam mengelola keragaman. Di konteks Indonesia, permasalahan persatuan bangsa yang berkaitan dengan ketegangan antar suku telah menjadi tantangan sejak awal kemerdekaan. Ancaman separatisme, ketidakstabilan, dan konflik sosial tetap menjadi isu yang dapat menghambat kesatuan negara (Komarudin, dkk., 2019). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggapi permasalahan tersebut, termasuk implementasi pendidikan nasional. Dalam era reformasi sejak tahun 1998 hingga sekarang, upaya meningkatkan kualitas

pendidikan nasional tidak hanya berasal dari pemerintah, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil (Morgenthau, 2010). Meskipun demikian, model pendidikan nasional masih menunjukkan kepecahan, ketidakberlanjutan, dan ketidakintegrasian yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut (Sánchez dan Noblit, 2016).

Fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat saat ini mencakup kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara sesuai konstitusi. Sebagai contoh adalah perlakuan masyarakat yang mencederai hukum dengan melakukan tindakan ilegal. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan hak atau ketidakpedulian terhadap proses politik dan hukum yang tengah berlangsung. Meskipun Indonesia memiliki moto “Bhinneka Tunggal Ika”, namun terdapat ketegangan dan konflik antar kelompok etnis, agama, dan budaya. Penyebabnya mungkin adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai kekuatan nasional. Kajian tentang pendidikan kebangsaan melibatkan tiga aspek utama, yaitu sejarah politik nasionalisme, multikulturalisme, dan kritik terhadap indoktrinasi. Berbagai strategi digunakan untuk mengembangkan nasionalisme, seperti promosi melalui media massa dan pelatihan nasional. Contohnya, di Amerika Serikat, Polandia, Cina, dan Jepang, nasionalisme dipromosikan melalui media massa *offline* dan *online*, film, serta materi ajar terstruktur (Latif, dkk., 2022).

Banks dan Barry (2017) menekankan bahwa pendidikan kebangsaan juga berkaitan dengan isu multikulturalisme, terutama dalam negara-negara yang memiliki masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan bahasa yang berbeda. Negara-negara multikultural, seperti Amerika Serikat, Prancis,

Finlandia, India, China, Hong Kong, Irak, dan Malaysia, telah mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan serupa untuk meningkatkan rasa cinta pada negara. Dalam menanggapi masalah keberagaman etnis, ras, dan heterogenitas, negara-negara tersebut merancang tata kelola pemerintahan dan kurikulum pendidikan nasional yang kompleks yang sesuai dengan konteks masyarakat. Keseluruhan perencanaan tata kelola pemerintahan dan pendidikan kebangsaan ini disusun dengan tujuan mewujudkan perubahan sosial dalam berbagai komunitas. Pada tingkat praktis, perbedaan yang ada dalam masyarakat, seperti perbedaan dalam fisik, ras, agama, bahasa, dan elemen lainnya, dapat menimbulkan ketegangan atau konflik. Oleh karena itu, melalui pendekatan sosio-etnis, pendidikan kebangsaan dirancang untuk mencapai harmonisasi, mendorong demokratisasi, dan mempromosikan toleransi sosial. Pelaksanaan pendidikan kebangsaan ini melibatkan program pendidikan, program pembelajaran, dan simulasi politik (Bonikowski, 2016).

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam memperkuat strategi Empat Konsensus Kebangsaan. Ketidapahaman mengenai konsep Empat Konsensus Kebangsaan dapat menimbulkan ketidakseimbangan, ketegangan sosial, dan potensi konflik di tengah masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya pendidikan yang lebih intensif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta signifikansi kesatuan dalam keragaman. Peran kunci dari pemimpin, tokoh masyarakat, dan media massa juga menjadi sangat vital dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam

mengenai Empat Konsensus Kebangsaan Indonesia. Intervensi diperlukan penerapan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih kuat terkait dengan Empat Konsensus Kebangsaan MPR RI (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) di semua lapisan masyarakat.

Selain itu, langkah-langkah untuk mempromosikan toleransi, pluralisme, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keragaman Indonesia juga menjadi penting guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif di semua tingkatan masyarakat juga menjadi esensial. Konsep ke-Indonesiaan yang terkandung dalam Empat Konsensus Kebangsaan MPR RI harus ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat dapat menginternalisasi Empat Konsensus Kebangsaan sejak usia muda dan memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, hal ini dapat menciptakan sikap nasionalisme sebagai suatu pandangan dan sikap yang menekankan persatuan dalam kelompok masyarakat yang bersatu karena memiliki kesamaan tertentu dan memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya atau dikenal sebagai bangsa (Disurya, dkk., 2022)

Sosialisasi mengenai Empat Konsensus Kebangsaan MPR RI merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), selanjutnya disingkat sebagai MPR RI. Keempat konsensus tersebut dianggap sebagai konsep inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kawasan rentan dan terluar urgensi penguatan Empat Konsensus Kebangsaan diperlukan sebagai sarana integrasi bangsa terutama pada generasi mudanya.

Penelitian terkait Empat Konsensus Kebangsaan telah banyak diteliti sebelumnya dalam bentuk Empat Pilar Kebangsaan sebelum adanya perubahan berdasarkan Putusan MK Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 mengenai pembatalan Frasa “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun kajian lebih berfokus pada implementasinya di lapangan. Penelitian milik Hastangka, dkk., (2019) mengkaji tentang dampak pendidikan Empat Pilar Kebangsaan di perguruan tinggi. Selanjutnya, kajian dilakukan oleh Annava, dkk. (2022) berfokus pada mengidentifikasi peran signifikan dari Empat Pilar Kebangsaan Indonesia dalam menetapkan arah strategis politik dan strategi nasional bangsa Indonesia. Belum pernah ada penelitian serupa dengan menggunakan tinjauan ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini yang kemudian mengisi ruang kosong kajian tersebut.

Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi Empat Konsensus Kebangsaan bagi pembangunan generasi muda dalam menyongsong Bonus Demografi dan implikasinya terhadap ketahanan sosial masyarakat Kepulauan Riau. Posisinya sebagai gerbang negara membutuhkan perhatian dan penguatan pula. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara akademis dan praktis. Diharapkan kajian ini mampu menambah khazanah pengkajian di ranah ketahanan nasional terutama ketahanan sosial masyarakat. Selanjutnya, secara praktis mampu menjadi acuan bagi para *stakeholder* terkait.

Penelitian mengenai sosialisasi Empat Konsensus MPR RI di Provinsi Kepulauan

Riau dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini dikonseptualisasikan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Empat Konsensus MPR RI dan upaya sosialisasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah. Subyek penelitian melibatkan berbagai sektor masyarakat, termasuk ahli, pakar, dan anggota masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer berisi informasi dan fakta yang diperoleh dari informan melalui pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan ini mencakup berbagai aspek terkait implementasi strategi pengembangan Empat Konsensus Kebangsaan MPR RI. Wawancara ini kemudian didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumen. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari berbagai dokumen, buku, laporan, artikel, dan catatan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tujuan mendapatkan interpretasi yang lebih mendalam dari sebuah tema menurut pemahaman kelompok. FGD diimplementasikan untuk menghindari potensi kesalahan interpretasi oleh peneliti dan juga untuk mencapai pemahaman kolektif terkait fokus masalah penelitian. Keunikan metode FGD, yang tidak dimiliki oleh metode kualitatif lain seperti wawancara mendalam atau observasi, adalah adanya interaksi antara peneliti, informan, dan antar informan. FGD pada penelitian ini menjadi alat pengumpulan data yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan rinci terkait implementasi strategi pengembangan Empat Konsensus MPR RI di Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Bonus Demografi dan ketahanan wilayahnya. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan triangulasi sumber



dan triangulasi metode. Analisis data dimulai dengan mereduksi data terkumpul. Data disajikan untuk mengetahui kelengkapannya serta penempatannya dalam penelitian ini. Proses analisis data berlanjut pada penarikan kesimpulan dari tiap temuan kajian.

## **PEMBAHASAN**

### **Strategi Empat Konsensus Kebangsaan Diimplementasikan Bagi Pembangunan Generasi Muda Dalam Menyongsong Bonus Demografi di Kepulauan Riau**

Dari segi geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak di antara 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara, serta antara 103°22' Bujur Timur hingga 109°4' Bujur Timur. Menurut data yang diperoleh dari Biro Pemerintahan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sekitar 1.800 pulau. Berdasarkan proyeksi penduduk interim tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 2.179.820 jiwa, terdiri atas 1.112.152 jiwa penduduk laki-laki dan 1.067.668 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,2, artinya setiap 100 penduduk perempuan diikuti oleh 104 penduduk laki-laki. Kota Batam memiliki jumlah penduduk terbanyak, mencapai 58,23 persen dari total populasi. Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah 264 penduduk per kilometer persegi, dengan Kota Tanjungpinang memiliki kepadatan tertinggi sebesar 1.595 penduduk per kilometer persegi. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 mencapai 1.259.712 penduduk, dengan 1.155.997 penduduk yang bekerja dan 103.715 penduduk yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi tercatat di Kota Batam sebesar 9,56 pada bulan Agustus 2022 (Badan Pusat Statistik Kepri, 2023).

Pertumbuhan PDRB memiliki dampak yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau, karena peningkatan PDRB berkontribusi pada penambahan *output*. Peningkatan *output* ini, pada gilirannya, meningkatkan permintaan terhadap faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Faktor lain yang signifikan terhadap TPT adalah Rasio Lulusan Sekolah (RLS), terutama karena tingkat pendidikan yang masih rendah di Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak selaras dengan kebutuhan perusahaan. Peningkatan pengangguran juga dapat disebabkan oleh para tenaga kerja berpendidikan tinggi yang menolak upah rendah dan memilih menunggu hingga mendapatkan gaji sesuai tingkat pendidikannya. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga berdampak signifikan terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan UMK dapat menyebabkan penurunan peluang kerja dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, karena biaya produksi perusahaan meningkat, mengakibatkan pengurangan tenaga kerja (Qausar dan Shinta Aminda, 2018).

Pernyataan ini pun didukung dengan penelitian Sari, dkk. (2023), yang menyatakan bahwa Kepulauan Riau juga tengah dalam ancaman penyelundupan pekerja migran secara ilegal. Kenaikan kasus penyelundupan manusia, khususnya di Kota Batam, menjelaskan bagaimana proses terjadi dalam hal ini pada Pekerja Migran Indonesia yang akan memasuki wilayah negara lain seperti Malaysia atau Singapura dengan cara menyelundup melalui jalur *rat port*. Lokasinya yang strategis, berdekatan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, memudahkan

kejahatan penyelundupan manusia ini terjadi di wilayah pesisir Kota Batam. Kesulitan dalam mengawasi daerah kepulauan seperti Kota Batam, fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, menyebabkan kejahatan penyelundupan manusia terus berlanjut hingga saat ini. Penyelundupan masih menunjukkan eksistensinya karena sejumlah faktor yang menjadi pemicu kegiatan tersebut, seperti geografi wilayah, pengawasan yang kurang efektif, partisipasi warga lokal, dan keterampilan pelaku dalam melaksanakan tindakan penyelundupan. Keempat faktor ini didasarkan pada kajian literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang mengulas aktivitas penyelundupan melalui jalur laut. Situasi ini menghasilkan fenomena kelangsungan tindak pidana penyelundupan melalui jalur laut yang masih terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

Perpindahan angkatan kerja baik secara legal maupun ilegal membuat pemerintah Kepulauan Kepri melaksanakan upaya-upaya intervensi untuk menjaga kesediaan angkatan kerja di sana. Kebutuhan akan Bonus Demografi bukan hanya peluang kerja namun juga angkatan kerja. Jika para ahli memutuskan untuk berpindah ke Singapura maupun Malaysia maka angkatan kerja kompeten pastinya akan berkurang. Salah satu strategi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan ideologis dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Empat Konsensus Kebangsaan dianggap sebagai struktur penyangga yang kokoh, disebut juga sebagai *soko guru* guna memastikan bahwa penduduk Indonesia merasakan kenyamanan, keamanan, ketenteraman, serta kesejahteraan, dan terhindar dari berbagai gangguan dan bencana. Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang diwajibkan dipahami oleh seluruh

masyarakat dan menjadi pedoman dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, dengan tujuan menciptakan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mencakup: (1). Pancasila; (2). UUD 1945; (3). NKRI; dan (4). Bhinneka Tunggal Ika.

Empat Konsensus tersebut tidak diartikan memiliki kedudukan yang setara; masing-masing konsensus memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Secara prinsip, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan tiga konsensus lainnya. Empat konsensus tersebut dianggap sebagai syarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk memiliki fondasi yang kuat dan meraih kemajuan berdasarkan karakter kepribadian bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia diharapkan meyakini bahwa empat konsensus tersebut merupakan prinsip moral ke-Indonesiaan yang menjadi panduan mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam kajian Agustin dan Warsono (2014) disebutkan bahwa Empat Konsensus Kebangsaan dianggap sebagai tiang penyangga yang kuat. Tujuannya adalah agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasa aman, nyaman, tenteram, sejahtera, dan terhindar dari berbagai gangguan atau bencana yang mungkin terjadi. Kekokohan Empat Konsensus Kebangsaan penting untuk menjadikannya sebagai benteng yang mampu menangkal gangguan dan ancaman, baik dari internal maupun eksternal. Konsensus-konsensus kebangsaan ini juga dapat diartikan sebagai sistem keyakinan atau *belief system* yang dapat menjamin terciptanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sistem ini juga biasa

disebut sebagai *philosophische grondslag* atau filosofi. *Belief system* ini mencakup konsep, prinsip, dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat dan menjadi dasar hidup mereka.

Diskusi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Empat Konsensus dilakukan di wilayah Kepulauan Riau dengan melibatkan partisipasi dari berbagai sektor, yaitu: (1). Akademisi; (2). Tokoh Masyarakat; (3). Tokoh Pemuda; (4). Pegawai Negeri dan Swasta; dan (5). Mahasiswa. Hasil dari diskusi ini menggambarkan kondisi terkini mengenai pemahaman Empat Konsensus di kalangan masyarakat. Selain itu, hasil diskusi juga membahas berbagai metode sosialisasi yang dapat diimplementasikan, serta harapan masyarakat terkait implementasi Empat Konsensus untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan negara.

*Pertama*, pemahaman Empat Konsensus di Masyarakat. Dampak globalisasi mengakibatkan berbagai perubahan, khususnya terkait dengan masifnya penggunaan perangkat teknologi, seperti gadget. Hal ini menyebabkan pergeseran peran berbagai pihak, termasuk guru, tokoh agama, dan bahkan dokter, seiring dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan individu untuk belajar secara mandiri dari berbagai tempat. Saat ini, masyarakat menghadapi kelelahan terkait dengan urusan ekonomi domestik dan konflik politik, sehingga pendekatan serius seperti ceramah satu arah tidak efektif. Strategi yang lebih kontemporer dan menghibur diperlukan untuk mengatasi kondisi ini. Pragmatisme yang merajalela dipicu oleh sistem pemilu, mendorong masyarakat menjadi materialistis di berbagai aspek kehidupan. Semangat kegotongroyongan sulit ditemukan di tengah masyarakat modern, dan krisis budaya yang meluas mengancam keberlanjutan identitas bangsa Indonesia,

mempercepat proses disintegrasi. Akulturasi budaya asing dan digitalisasi yang tak terhindarkan memerlukan upaya pencegahan terhadap dampak negatifnya.

Isu yang mengkhawatirkan saat ini melibatkan radikalisme, terorisme, dan penurunan karakter anak-anak sekolah. Intoleransi muncul di masyarakat dan di sekolah akibat pemahaman yang salah dalam dunia pendidikan. Radikalisme banyak dipicu oleh terjabaknya individu dalam komunitas tertentu, sehingga revolusi pendidikan perlu diimplementasikan. Peran pemuka agama masih ada, namun tidak seefektif dulu karena masyarakat lebih banyak mendengar dan belajar dari gadget. Isu radikalisme dan terorisme yang berbasis agama semakin menonjol di Indonesia.

Istilah “Empat Konsensus” belum akrab di kalangan masyarakat, meskipun mereka mengenal Pancasila dan UUD 1945. Sosialisasi perlu dilakukan secara lebih masif dan terstruktur di semua lapisan masyarakat. Di daerah dengan minim penggunaan gadget, budaya lokal dan implementasi Empat Konsensus masih dianggap kuat, belum tergerus oleh dampak negatif kemajuan zaman. Empat Konsensus sering hanya dikenal sebagai slogan dan tidak dipahami oleh masyarakat awam. Generasi muda kurang familier dengan istilah Empat Konsensus, lebih cenderung mengenal Pancasila tetapi kurang memahami tiga Konsensus lainnya. Pada periode pasca Revolusi 1998, terutama setelah penghilangan beberapa mata pelajaran kebangsaan dalam kurikulum sekolah, seperti P4, PMP, dan PSPB, terlihat adanya kehilangan nilai-nilai kebangsaan. Fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa hampir tidak terlihat. Sosialisasi Empat Konsensus di masyarakat lebih cenderung pada aspek penatausahaan.

Kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh Indonesia memengaruhi capaian *output* sosialisasi Empat Konsensus, karena tingkat pendidikan berkorelasi dengan daya serap masyarakat. Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, belum optimal diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaksanaan sosialisasi Empat Konsensus yang hanya diterima oleh sebagian orang di wilayah tertentu. Selain itu, kurangnya kesadaran personal akan pentingnya nilai-nilai fundamental bangsa (Empat Konsensus) terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi penyebab perilaku masyarakat yang semakin menjauh dari implementasi Empat Konsensus Kebangsaan.

Merdeka belajar tidak boleh menghilangkan identitas kebangsaan. Interaksi sosial juga harus diperhatikan sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Degradasi moral yang meluas perlu diantisipasi dengan strategi pengembangan sosialisasi Empat Konsensus yang terarah, didukung oleh sistem pendidikan yang komprehensif, terutama sejak tingkat dini. Di Provinsi Kepulauan Riau, sekolah penggerak yang mengintegrasikan Pancasila sebagai kearifan lokal dan kegiatan terkait bisa dijadikan contoh. Penguatan pemahaman di tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai landasan untuk mendukung Bonus Demografi.

Indonesia kini sedang mengalami masa menuju Bonus Demografi. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971, mencapai 53,39 persen dari total populasi pada tahun tersebut, dan meningkat menjadi 70,72 persen pada tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) semakin mencolok

mulai 2020 menurut Badan Pusat Statistik (Nasution, 2021). Dengan struktur demografi seperti ini, Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi yang memberikan kesempatan besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dimanfaatkan secara optimal. Keoptimalan tersebut dimulai dengan penguatan rasa cinta generasi mudanya terhadap negara. Dengan nilai-nilai yang diamini, pengabdian mampu diciptakan sehingga pemuda tidak berorientasi untuk bekerja di luar negeri. Fokus mampu lebih tersebar bukan hanya sebagai pekerja namun juga penyedia lapangan kerja. Kesempatan kerja lebih mampu mengakomodir para angkatan kerja. Munculnya potensi-potensi kewirausahaan di kalangan anak muda membutuhkan pendekatan berkebangsaan sehingga sejalan dengan strategi yang dijalankan oleh negara.

*Kedua*, pentingnya sosialisasi Empat Konsensus dalam masyarakat. Sosialisasi terkait Pancasila sudah diterapkan, meski belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Masyarakat secara umum belum sepenuhnya merespons sosialisasi terkait Empat Konsensus yang dilakukan oleh anggota DPR/MPR, lebih cenderung mengedepankan pragmatisme dengan fokus pada aspek penggantian biaya transportasi tanpa memperhatikan substansi atau materi yang disampaikan, yang dianggap kurang menarik. Dalam konteks pendidikan, perubahan kurikulum yang terlalu cepat tidak hanya menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku pendidikan, tetapi juga berpotensi melemahkan pencapaian kualitas pendidikan pada anak didik yang senantiasa menjadi subjek uji coba. Mata pelajaran dasar yang krusial seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan (PPKN), serta Budi Pekerti telah dihilangkan dari semua tingkatan pendidikan, menyebabkan perlunya meningkatkan sosialisasi empat Konsensus sebagai upaya mencegah disintegrasi bangsa. Masyarakat memiliki kecenderungan lebih mudah meniru hal-hal yang bersifat negatif, sehingga empat Konsensus harus dianggap sebagai produk dan dalam proses sosialisasi perlu diperhatikan agar dapat dijual (*marketable*). Meskipun masyarakat mengenal, namun pemahaman detail terkait Empat Konsensus masih kurang meluas dan komprehensif.

Contoh implementasi sosialisasi empat Konsensus di dunia usaha generasi muda dapat ditemukan dalam pelatihan bela negara yang wajib diadakan di Bank Mandiri (BUMN) Kantor Wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian dari kriteria promosi jabatan. Pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek nasionalisme, tetapi juga pada pembentukan karakter dan jiwa korsa. Perusahaan perbankan telah mengantisipasi potensi radikalisme dengan melakukan pemantauan terhadap rekening yang mencurigakan atau aktivitas pencucian uang hingga tindak pidana terkait lainnya. Dalam lingkungan internal Bank Mandiri, terdapat regulasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Direksi yang mengatur etika bermedia sosial, melarang unggahan yang bersifat provokatif atau sensitif terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) dengan memperhatikan etika kerja. Rasa ketidakamanan dari kelompok minoritas akibat dominasi mayoritas perlu diatasi karena merupakan implementasi dari prinsip empat Konsensus. Diskriminasi dan intoleransi masih marak terutama di wilayah tertentu yang memiliki kecenderungan tersebut. *Autolabel* dan sikap rasis yang masih terasa kuat,

perlu dieliminasi melalui sosialisasi empat Konsensus secara berkelanjutan di semua lapisan masyarakat dan etnis. Kurangnya pendidikan dapat menjadi pemicu terjadinya kriminalitas dan radikalisme. Sebelum era Reformasi, pendidikan kebangsaan diajarkan melalui kurikulum bela negara, namun saat ini hal tersebut sudah tidak diimplementasikan. Agar terjadi kesinambungan pendidikan kebangsaan di kalangan anak didik, negara harus hadir dalam upaya pembelaan negara, yang dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Dari ketiganya strategi Empat Konsensus cenderung lebih efektif di lingkungan kerja karena adanya landasan kuat seperti peraturan-peraturan internal yang melekat. Namun di masyarakat dengan ragam jenis budaya mendapatkan apresiasi yang kurang. Padahal lingkungan pendidikan dan masyarakat merupakan lokasi penting dalam pembentukan nilai-nilai kebangsaan. Dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan masyarakat yang semakin meningkat, terutama akibat penurunan nilai-nilai yang dianut oleh generasi muda, adalah suatu kewajiban yang penting bagi kita untuk senantiasa menginternalisasi pemahaman akan kebermaknaan nilai-nilai dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Generasi muda memiliki tanggung jawab signifikan terhadap harapan bangsa, di mana kontribusi mereka diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan lingkungan alam, asalkan terdapat keterkaitan hubungan timbal balik yang berkelanjutan (Yuwantika, 2022).

*Ketiga*, pelibatan masyarakat dalam sosialisasi Empat Konsensus. Berkaitan dengan minimnya sosialisasi mengenai Empat Konsensus di kalangan masyarakat, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas



sosialisasi dengan melibatkan guru-guru sebagai subjek utama, dengan harapan mereka dapat berperan sebagai panutan bagi siswa dan anggota civitas akademika. Selain itu, partisipasi tokoh-tokoh masyarakat hingga tingkat RT juga perlu dipertimbangkan, mengingat contoh dan keteladanan dari figur-figur yang dihormati dapat menjadi sarana yang efisien dalam menyukseskan sosialisasi. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat, diakui sebagai fondasi utama dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan mendasar perlu dilakukan dengan menempatkan keluarga sebagai agen perubahan. Diperlukan pemilihan *influencer* yang tepat dalam penyampaian sosialisasi, dengan mempertimbangkan target audiens seperti usia, jenis kelamin, asal wilayah, dan faktor lainnya.

Peran aktif masyarakat dalam memperkuat kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan, dengan harapan masyarakat dapat memberikan penghargaan satu sama lain, berperilaku etis, menggalang kerukunan, dan membina toleransi di antara anggota beragama (Yusuf, dkk., 2022). Empat Konsensus kebangsaan diaplikasikan dalam kegiatan masyarakat berbasis kearifan lokal. Sebagai produk kebudayaan, kearifan lokal mencakup pengetahuan yang bersumber dari tradisi, sejarah, pendidikan formal dan informal, seni, agama, dan berbagai interpretasi kreatif. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu sintesa budaya yang dibentuk oleh pihak-pihak lokal melalui serangkaian proses berulang, yang melibatkan internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya. Kearifan lokal ini disosialisasikan dalam bentuk norma-norma, yang kemudian menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Marijan, 2020).

*Keempat*, model sosialisasi yang dapat dilaksanakan. Ragam target audiens dalam proses sosialisasi Empat Konsensus menuntut adanya skema pelaksanaan yang berbeda-beda. Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait edukasi secara langsung, seperti guru-guru dari berbagai mata pelajaran di lembaga pendidikan swasta maupun negeri, dan pejabat di dalam lingkup institusi pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai tersebut pada masa pendidikan dini sebagai landasan maupun pengembangan nilai filosofisnya di tingkat perguruan tinggi. Generasi muda masih mencari jati diri dan melakukan banyak eksperimen sosial, adanya peran serta pendidik akan membantu dalam mengarahkan perilakunya sehingga masih relevan dengan nilai kebangsaan.

Terhadap masyarakat tradisional, diperlukan pendekatan sosialisasi Empat Konsensus yang berbeda, terutama pada wilayah yang telah terpapar oleh perkembangan gadget. Salah satu strategi dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, seni budaya, dan acara kemasyarakatan agar dapat lebih efektif dibandingkan dengan model ceramah konvensional yang bersifat monoton. Langkah-langkah untuk membangkitkan semangat nasionalisme dapat diarahkan melalui penyelenggaraan acara seni budaya tahunan yang diminati oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda (Prमितasari, 2021). Dalam rangkaian acara tersebut, dapat dimasukkan unsur-unsur yang menggambarkan semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air, dengan tujuan membentuk pemahaman yang lebih mendalam terkait perjuangan pahlawan dan pejuang dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Tindakan ini akan memperkokoh kesadaran masyarakat akan makna nasionalisme dan cinta tanah air.

Pentingnya keteladanan sebagai kunci utama keberhasilan implementasi, sehingga pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah perlu menunjukkan contoh perilaku yang sesuai agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat umum, dan tidak sebaliknya yang dapat melemahkan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan (*role model*) dilakukan dengan memberikan bimbingan dan melatih ketaatan, membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air, menanamkan sikap demokratis, mengajarkan peduli sosial dan tidak apatis. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan (*habituation*) dilakukan dengan membiasakan siswa memiliki sikap toleransi beragama, saling mencintai dan menghargai sesama manusia, tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk terpecah belah, terbiasa mengambil keputusan secara musyawarah, berteman dengan siapa saja dan memiliki solidaritas yang tinggi (Kusumawardani, dkk., 2021).

Saran spesifik mencakup penyiaran pesan moral yang mendidik secara rutin melalui gadget atau media sosial setiap hari, seperti *Quote of the Day* atau Meme positif, yang lebih mudah diterima oleh publik, terutama generasi muda. Melalui praktik literasi, masyarakat memiliki peluang untuk mendalami pemahaman mereka terhadap Pancasila, sehingga nilai-nilai tersebut dapat menjadi kebiasaan positif dan terwujud dalam tindakan atau perilaku sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Budaya literasi digital akan mendorong generasi muda untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif dan kritis dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Penerapan literasi juga akan membantu

masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan berkualitas (Khoirunisa, dkk., 2022).

Strategi *top-down*, dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada pejabat pemerintah, partai politik, dan kepala lembaga, baru kemudian dilanjutkan ke struktur di bawahnya. Salah satu upayanya terletak pada pendidikan muatan lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kurikulum muatan lokal merujuk pada materi pembelajaran di lingkungan sekolah yang menggambarkan potensi dan karakteristik khas suatu daerah dengan tujuan membentuk pemahaman siswa terhadap keunggulan dan kearifan lokal di daerah tempat tinggal mereka. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai luhur yang menjadi keunggulan bersaing atau perbandingan bagi Provinsi Kepulauan Riau, tidak terdapat di wilayah lain di Indonesia. Hal ini mencakup pengetahuan seputar aspek keagamaan, ekosistem hutan dan rawa, sektor maritim dan perikanan, pertanian, perkebunan, serta karakteristik masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Optimalisasi penggunaan media dengan menghadirkan contoh-contoh nyata melalui cerita-cerita inspiratif dalam masyarakat. Hal ini menimbang penerapan fungsi kontrol sosial oleh media massa dalam mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, terutama, belum sepenuhnya terealisasi secara menyeluruh. Informasi yang disampaikan kepada publik sering kali tidak sejalan dengan realitas dan tersebar melalui pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa melakukan penelusuran ulang terhadap berita dan sumber informasi, masyarakat cenderung meyakini informasi tersebut tanpa adanya verifikasi

yang memadai (Anditya, 2020). Dengan menghadirkan kisah inspiratif maka kisah yang berasal dari kejadian nyata lebih diterima dengan lingkungan masyarakat. Validitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan karena masih terdapat pihak-pihak yang menyaksikannya sendiri.

*Kelima, stakeholders* yang memerlukan sosialisasi Empat Konsensus. Berdasarkan *Focus Group Discussion* bersama para informan, diketahui bahwa terdapat sejumlah *stakeholder* yang memerlukan sosialisasi Empat Konsensus pada saat ini. Guru di semua tingkatan dianggap sebagai objek utama dalam pelaksanaan sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan. Pemikiran ini bersumber dari keyakinan bahwa guru memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi yang berpengaruh besar dalam membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai siswa, termasuk nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, guru diharapkan untuk aktif mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kurikulum dan pengajaran mereka, baik melalui mata pelajaran khusus seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun melalui konteks pembelajaran lainnya. Fokus pada empat Konsensus dapat membantu guru dalam membimbing siswa memahami sejarah, budaya, dan identitas nasional mereka, yang pada gilirannya membangun kesadaran kebangsaan yang kuat di kalangan generasi muda.

Pemuka agama juga memiliki peran yang signifikan, terutama dalam aspek moral, etika, dan nilai-nilai sosial. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas mereka, pemuka agama dapat menjadi mitra yang efektif dalam upaya sosialisasi empat Konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan mereka dapat memanfaatkan hubungan erat dengan

anggota komunitas, serta kepercayaan dan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemuka agama dapat menjadi otoritas moral yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai empat Konsensus, seperti persatuan, kemandirian, keadilan, dan kemakmuran. Pendekatan spiritual yang mereka gunakan dapat mengaitkan nilai-nilai agama dengan makna mendalam dari empat Konsensus, seperti cinta kasih, toleransi, persatuan, dan kebaikan.

Pendekatan lain yang dianjurkan adalah penetrasi melalui kelompok-kelompok sasaran, seperti himpunan, kelompok, atau komunitas lokal. Strategi ini bertujuan agar pemahaman empat Konsensus dapat merambat ke seluruh jejaring sosial yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut, sehingga dapat menyebar secara lebih luas di tengah masyarakat. Meskipun bergitu, organisasi masa seperti ini juga membutuhkan pengawasan sehingga tidak terjadi kesalahan penyampaian nilai.

*Keenam*, harapan masyarakat terhadap terimplementasinya Empat Konsensus. Pengukuran target dalam konteks sosialisasi Empat Konsensus Kehidupan Kebangsaan merupakan tahap kritis yang esensial untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan sosialisasi tersebut. Dalam evaluasi dan perbaikan program sosialisasi, pengukuran target menjadi unsur penting yang membantu mengidentifikasi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Pengetahuan mengenai area yang telah berhasil memungkinkan kita untuk mengadopsi kembali strategi yang efektif, sementara pengidentifikasian masalah membuka peluang perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program. Pemberian label terhadap radikalisme, sebagai bagian yang sangat sensitif dan krusial, merupakan langkah signifikan dalam mengenali dan

mengatasi potensi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan sosial. Harus diingat bahwa pelabelan radikalisme harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada bukti yang kuat, mengingat penggunaannya yang tidak tepat dapat memiliki konsekuensi serius, seperti multitafsir atau persepsi yang keliru yang dapat merugikan individu atau kelompok.

Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan perlu diimplementasikan secara berkesinambungan dengan tujuan yang terdefinisi dengan jelas guna menjaga dan melindungi generasi mendatang. Proses sosialisasi ini harus terintegrasi baik dalam pendidikan formal maupun informal, serta termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa generasi penerus memiliki fondasi moral dan etika yang kuat, serta memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan masa depan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat. Pembaruan program sosialisasi empat Konsensus untuk menyesuaikan dengan konteks globalisasi dan perubahan zaman menjadi suatu keputusan yang wajar, jika dianggap diperlukan oleh pemerintah dan lembaga legislatif, guna menjaga relevansi dan efektivitas program. Inisiatif dari MPR untuk memaksa pemerintah melakukan restrukturisasi program sosialisasi dengan format baru yang disesuaikan dengan dinamika global dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan dan alasan.

Pemaksaan untuk mengubah desain program sosialisasi empat Konsensus didasarkan pada beberapa faktor, termasuk ketentuan hukum atau kebijakan; antisipasi terhadap perkembangan masa depan; dan adaptasi terhadap budaya digital. Secara lebih rinci (1). Pemerintah mungkin telah mengadopsi kebijakan atau peraturan yang

menuntut pembaruan atau penyesuaian program sosialisasi empat Konsensus. Hal ini dapat berasal dari resolusi atau undang-undang yang dihasilkan oleh MPR atau badan legislatif lainnya. Sebuah strategi membutuhkan landasan yang kuat pula dimulai dari kebijakan ini. Kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan ke daerah-daerah melalui otonomi daerah. Oleh karenanya, agenda ini bukan semata-mata proyek pemerintah namun juga *stakeholder* di tingkat wilayah. (2). Pemerintah dan lembaga legislatif seperti MPR dapat merasa perlu merencanakan program sosialisasi yang dapat mengantisipasi perkembangan di masa depan, sehingga memastikan pemahaman yang relevan bagi generasi mendatang. Pembangunan sumber daya manusia selama ini memang telah digalakkan, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan kontribusi dari aktor-aktor swasta. Oleh karena itu dalam strategi selanjutnya selain pembaharuan materi sesuai kebutuhan pembangunan jangka panjang, namun juga bagaimana sebuah jalinan antara pemerintah dan *private sector* dibangun. (3). Generasi muda saat ini tumbuh dalam lingkungan digital yang kuat. Pembaruan Empat Konsensus dapat memasukkan elemen-elemen digital, seperti literasi digital dan etika digital, agar sesuai dengan realitas yang dihadapi generasi masa kini.

### **Implikasi Empat Konsensus Kebangsaan Terhadap Ketahanan Sosial Kepulauan Riau**

Friedhelm Betke menerangkan tiga kriteria untuk mencapai ketahanan sosial masyarakat. Masyarakat harus mampu melindungi anggotanya yang berada dalam kondisi rentan terhadap perubahan sosial

dan berbagai ancaman yang mungkin timbul. Masyarakat yang memiliki ketahanan sosial mampu melakukan investasi sosial dalam pembentukan jaringan sosial yang memberikan manfaat signifikan bagi keseluruhan masyarakat. Kemudian, kapasitas masyarakat untuk mengembangkan mekanisme operasional yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan yang timbul dalam dinamika sosial masyarakat (Rahmawati, dkk., 2021).

*Pertama*, perlindungan terhadap masyarakat rentan. Masyarakat Kepulauan Riau rentan terhadap upaya perdagangan manusia karena tingkat pengangguran yang tinggi. Mereka tergiur dengan tawaran-tawaran dari pihak asing sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka. Kawasan Batam dan Tanjungpinang, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi salah satu jalur utama yang dimanfaatkan dalam praktik perdagangan manusia. Batam berperan sebagai tempat transit bagi korban dan pelaku sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, khususnya Malaysia dan Singapura. Di Batam, terdapat sejumlah ‘pelabuhan tikus’ yang merupakan pelabuhan tidak resmi yang terletak di perkampungan sepanjang pantai Pulau Batam. Menjadi tanggung jawab Pemerintah Kepulauan Riau dan masyarakat setempat. Dengan menggunakan pendekatan Empat Konsensus Kebangsaan, perlindungan masyarakat merupakan upaya yang dibangun bersama oleh beragam pihak dengan menggunakan potensi-potensi daerah.

Di Kota Tanjungpinang, individu yang menjadi korban perdagangan manusia ditempatkan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kepedulian dengan mendirikan

RPTC sebagai upaya Perlindungan Sosial bagi korban perdagangan manusia yang telah dideportasi dari Malaysia. RPTC berfungsi sebagai lokasi penampungan sementara bagi para korban sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal mereka. Letak RPTC berada di Desa Sungai Timun, Kecamatan Senggarang, Tanjungpinang, dan didirikan di atas tanah seluas 2,5 Ha yang disumbangkan oleh Pemerintah Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI. Pendanaan untuk konstruksi RPTC diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menerapkan mekanisme Tugas Pembantuan (Dewi, dkk., 2023).

RPTC memiliki peran ganda sebagai lembaga rehabilitasi sosial bagi individu yang menjadi korban perdagangan manusia. Sebagai entitas di bawah Kementerian Sosial, RPTC memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan awal, penyelamatan, dan penanggulangan kondisi traumatis yang dialami oleh para korban. Selain itu, fokus rehabilitasi sosial RPTC adalah untuk memulihkan korban dari dampak kondisi psikososial yang diakibatkan oleh perdagangan manusia, serta mengembalikan fungsionalitas sosial mereka dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan rehabilitasi sosial diarahkan pada mengurangi beban, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban perdagangan manusia sehingga mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal.

RPTC, sebagai tempat perlindungan, difokuskan untuk menangani korban kekerasan dan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah. Kementerian Sosial Republik Indonesia mengoperasikan dua unit RPTC, yakni RPTC Bambu Apus Cipayung di Jakarta dan RPTC di Tanjungpinang,



Kepulauan Riau. Peran Kementerian Sosial melibatkan penyediaan kebutuhan harian korban selama mereka berada di RPTC, pengaturan transportasi untuk kepulangan ke daerah asal, serta penyediaan tenaga sosial dan psikolog. Kolaborasi Kementerian Sosial dengan lembaga lain, seperti rumah sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diarahkan untuk memberikan layanan kepada korban yang mungkin mengalami gangguan psikotik atau kekerasan fisik. Di tingkat lokal, pengelolaan Rumah Perlindungan Trauma Center diurus oleh Dinas Sosial Kota.

*Kedua*, pembentukan jaringan sosial. Dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya ancaman perdagangan manusia. Dibentuklah Satgas TPPO tingkat Provinsi Kepri sebagai turunan dari Satgas TPPO Pusat. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang akan disebut sebagai Gugus Tugas Provinsi selanjutnya, merupakan entitas koordinatif yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan inisiatif dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi. Lembaga yang tergabung mulai dari imigrasi, kepolisian, instansi sosial dan instansi terkait lainnya. Selain itu Satgas ini juga dibantu oleh LSM-LSM yang bergerak dalam perlindungan perdagangan orang (POLDA KEPRI, 2023).

Akan tetapi meskipun telah terbentuk jaringan perlindungan di sektor pemerintahan, dibutuhkan pula jaringan perlindungan di tingkat masyarakat. Namun disayangkannya, masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung tindakan ini tetap berlangsung. Forrel mengungkapkan bahwa ‘Pelaku perdagangan manusia terdorong oleh motif finansial’. Dengan kata lain, motivasi pelaku perdagangan manusia adalah keuntungan finansial. Faktor ekonomi

menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan manusia, yang dipicu oleh kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja yang memadai sejalan dengan jumlah penduduk yang besar. Situasi ini mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan, bahkan dengan meninggalkan daerah asalnya, meskipun dengan risiko yang signifikan. Tingkat kemiskinan yang parah dan minimnya peluang kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, demi mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga (Kasim, 2020).

Selain kemiskinan, ketidaksetaraan tingkat kesejahteraan antar negara juga menjadi penyebab perdagangan manusia. Negara-negara yang menjadi penerima korban perdagangan manusia dari Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi, memiliki tingkat kekayaan yang lebih tinggi daripada Indonesia. Hal ini dikarenakan para migran memilih berharap untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dengan bermigrasi ke negara-negara tersebut. Terlebih lagi, gaya hidup elit dengan budaya konsumtif telah merasuki sebagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Wanita muda memiliki keinginan untuk menikmati gaya hidup mewah tanpa perlu melewati perjuangan berlebihan. Mereka memilih jalur yang lebih cepat untuk mencapai kemewahan, meskipun tanpa pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi untuk meraih kemewahan tersebut. Untuk para pelaku perdagangan manusia, kondisi seperti ini menjadi peluang untuk merekrut korban yang mencari gaya hidup semacam itu.

Empat Konsensus Kebangsaan menjadi sarana edukasi dan penanaman nilai bagi masyarakat bahwa dalam menciptakan kesejahteraan bukan hanya berasal dari sektor

pemerintah, namun masyarakat pun memiliki peran yang sama. Jika masyarakat terus menerus apatis terhadap fenomena ini, maka ancaman yang timbul akan melebar dan bisa jadi akan menimpa kelompoknya. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan membantu mereka memahami bahwa keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat dan *stakeholder* terkait. Meskipun dari latar belakang yang berbeda, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Ketiga*, resolusi konflik. Langkah-langkah pemerintah memerlukan persetujuan masyarakat setempat melalui komunikasi yang efektif guna mencegah potensi konflik. Meskipun demikian, jika proses komunikasi mengalami hambatan, pelaksanaan pembangunan akan tetap dijalankan sesuai dengan hukum dan regulasi negara. Situasi ini dapat memicu respons sosial berupa resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dalam masalah migrasi ilegal di Kepulauan Riau, ranahnya telah masuk ke pidana sehingga pengendalian dan pengentasan masalah menggunakan pendekatan hukum daripada resolusi konflik. Oleh karena itu kembali lagi Satgas TPPO Provinsi berperan dalam pencegahan, penanganan hingga rehabilitasi korban. Upaya ini dijalin secara berkesinambungan dengan masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan diharapkan menjadi penyadar betapa berbahayanya sindikat perdagangan orang. Pemahaman membuat mereka lebih bisa menimbang tawaran-tawaran pekerjaan yang diberikan. Selanjutnya sebagai upaya pencegahan, para tokoh masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pergerakan mencurigakan di tingkat masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasar uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

*Pertama*, Permasalahan utama di Kepri adalah penyelundupan pekerja migran ilegal, terutama di Kota Batam, sebagai jalur penyelundupan menuju Malaysia atau Singapura. Implementasi dari upaya intervensi pemerintah untuk menjaga angkatan kerja melibatkan kebijakan Bonus Demografi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui Empat Konsensus Kebangsaan. Kendati demikian, ancaman disintegrasi bangsa muncul karena globalisasi, degradasi moral, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap Empat Konsensus.

*Kedua*, Pelaksanaan sosialisasi Empat Konsensus perlu ditingkatkan secara masif dan terstruktur, khususnya di kalangan guru dan tokoh masyarakat. Peran masyarakat, terutama keluarga, sangat penting untuk membangun kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Diperlukan juga model sosialisasi yang berbeda sesuai dengan target audiens, seperti melalui kegiatan keagamaan, seni budaya, dan literasi digital. Validitas informasi dan penggunaan media dengan cerita inspiratif dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi. *Stakeholders* utama yang memerlukan sosialisasi Empat Konsensus adalah guru, pemuka agama, dan masyarakat, dengan pemerintah sebagai penggerak utama dan pencontoh nilai-nilai kebangsaan. Secara implementatif, Strategi Empat Konsensus Kebangsaan pada generasi muda untuk mendukung bonus demografi masih terbatas pada penyadaran. Ke depannya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan memanfaatkan kondisi sumber daya setempat.

*Ketiga*, Implikasi dari Strategi Empat Konsensus dalam membangun ketahanan sosial

masyarakat di Kepulauan Riau cenderung pada membentuk landasan dan nilai-nilai pada masyarakat untuk terpacu dalam menciptakan kestabilan sosial. Komponen ketahanan berupa perlindungan terhadap masyarakat rentan dalam konteks perdagangan manusia, terutama di Batam dan Tanjungpinang, dilakukan melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Pembentukan jaringan sosial dilakukan dengan membentuk Satgas TPPO dan Gugus Tugas Provinsi untuk koordinasi antar instansi. Namun, tantangan masyarakat yang rentan terhadap perdagangan manusia masih ada, terkait motivasi finansial dan ketidaksetaraan ekonomi. Resolusi konflik diarahkan pada komunikasi efektif dengan masyarakat setempat, namun dalam beberapa kasus, pendekatan hukum juga diperlukan dalam menangani masalah migrasi ilegal. Kolaborasi antara Satgas TPPO, masyarakat, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko perdagangan manusia di Provinsi Kepulauan Riau.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adeosun, O. T., dan O.O. Popogbe, 2021, "Human capital flight and output growth nexus: evidence from Nigeria", *Review of Economics and Political Science*, Vol. 6 No. 3, pp. 206–222.

Agustin, D., dan Warsono, 2014, "Tingkat Pemahaman Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Mojokerto Tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2, hh. 387–401.

Anditya, A. W., 2020, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia", *Nurani Hukum*, Vol. 3 No.1, hh. 1-30.

Annava, V. A., B.A., Yulianto, P. Suwarno, P. Widodo, H.Juni, dan R. Saragih, 2022, "Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Dasar Perumusan Naskah Politik dan Strategi Nasional", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, hh. 2555–2562.

Arybowo, S., 2009, "Kebijakan Pembangunan "SIJORI" dan Dampaknya Terhadap Kebudayaan" *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol. 11, No. 10, h. 67.

Asshiddiqie, J., 2020, *Pancasila : identitas konstitusi berbangsa dan bernegara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik Kepri, 2023, "Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka", *B.Statistik K.Riau*, VIII(02).

Banks, J. A., dan C. Barry, 2017, *An Introduction to Multicultural Education*, New York: Pearson.

Bonikowski, B., 2016, "Nationalism in Settled Times", *Annual Review of Sociology*, Vol. 42, hh. 427–449.

Dewi, A. E., Rahman, A., Farhan Nasution, M., Raja, M., Haji, A., & Raja, U. M., 2023, "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Human Trafficking di Kepulauan Riau", *Scientia Sacra: Jurnal Sains*, Vol. 3 Vol. 2, hh. 37–47.

Disurya, R., L.Sardana, S. Husnulwati, S. Wahyuningsih, 2022, "Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Untuk Meningkatkan Pengetahuan (Studi Pada Sma Negeri 1 Lempuing Jaya)", *Wahana Dedikasi*, Vol. 5 No. 2, hh. 6–10.

Febrianti, S., F.N.Azizah, dan D.P. Adi, 2020, "Sengketa Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus Pulau Sebatik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, hh. 127–137.

- Fransisco, W., 2018, "Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia". *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, hh. 1828–1837.
- Hastangka, H., Armawi, A., & Kaelan, K., 2019, "Dampak sosialisasi empat pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 2, hh. 98–110.
- Kasim, J., 2020, *Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia*, Diakses dari <<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>>
- Kesbangpol Kepri, 2023, *Rapat Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor Penegakan Hukum Kepulauan Riau*, Diakses dari <<https://kesbangpol.kepriprov.go.id/2023/10/04/rapat-koordinasi-dan-sinergitas-lintas-sektor-penegakan-hukum-kepulauan-riau/>>
- Khoirunisa, N., V.R.Lestari, F.A. Damayanti, A.A. Marhamah, H. Fadilah, dan R.G. Nugraha, 2022, "Penerapan Budaya Literasi Sebagai upaya Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hh. 2244–2252.
- Komarudin, Alkhudri, A. T., S. Ubedilah, A.R. Casmana, 2019, "The Nationality Education Model: The Implementation of a Score-A Training Model for Youth Across Different Cultures in Indonesia", *Journal of Social Studies Education Research*, Vol. 10, No. 3, hh. 364–386.
- Kurniawan, A., 2019, "Determinan Pengangguran Penduduk Migran Di Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(October), hh. 1-20.
- Kusumawardani, F., A. Akhwani, N. Nafiah, M. Taufiq, 2021, "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Pancasila melalui Keteladanan dan Pembiasaan di Sekolah Dasar", *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No.1, hh. 1–10.
- Latif, S., U. Suherman AS., M. Supriatna, I. Ilfiandra, 2022, "Developing A Cultural Intelligence Instrument for Guidance and Counseling Teachers", *Journal of Educational Science and Technology (EST)*, Vol. 8, No. 1, hh. 1-9.
- Marijan, K., 2020, "Revitalisasi Kearifan Lokal guna Memperkuat Karakter Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional", *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 2, No.1, hh. 35–40.
- Morgenthau, H. J., 2010, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- MPR RI., 2014, *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Nasution, M., 2021, "Relationship between Demographic Bonus, Human Development Index, and Employment Development Index with Economic Growth", *Jurnal Budget*, Vol. 6, No. 1, pp. 74–94.
- Nurgiansah, T. H., 2021, *Pendidikan Pancasila*, Diakses dari <[books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=h7kpEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA39%5C&dq=penyiaran+publik+literasi+digital+ketahanan+informasi%5C&ots=ml7dDgmF8h%5C&sig=c9oo3un9ZISvy0DZG2joVKuEUvQ](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=h7kpEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA39%5C&dq=penyiaran+publik+literasi+digital+ketahanan+informasi%5C&ots=ml7dDgmF8h%5C&sig=c9oo3un9ZISvy0DZG2joVKuEUvQ)>
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- POLDA KEPRI, 2023, *Satgas TPPO Polda Kepri Kembali Berhasil Gagal Pengiriman Calon PMI Ilegal Ke Negara Timur Tengah*, Diakses dari <<https://humas.polri.go.id/2023/06/18/satgas-tpo-polda-kepri-kembali-berhasil-gagal-pengiriman-calon-pmi-ilegal-ke-negara-timur-tengah/>>
- Pramitasari, W. A., 2021, “Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pertunjukan Seni dan Budaya”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9 No. 4, hh. 23–27.
- Qausar, Najasyi, dan R. Shinta Aminda, 2018, “Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau”, *Journal Of Development Economic and Digitalization*, Vol. 1, No. 1, hh. 38–50.
- Rahmawati, F., Dewi, M. Hanita, A. Iskandar, 2021, “Ketahanan Sosial Masyarakat di Kawasan Rawan Narkotika : Studi Kasus di Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara”, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Vol. 4, No. 1, hh. 5–14.
- Sánchez, M., dan G.W. Noblit, 2016, *Education Without Nationalism: Locating Leadership When Borders No Longer Hold BT - Educational Leaders Without Borders: Rising to Global Challenges to Educate All* (R. Papa & F. W. English (eds.); hh. 39–62).
- Sari, I., R.A. Putri, D. Gunawan, S.F. Riyadi, K. Kustiawan, A.W. Swastiwi, 2023, Handling People Smuggling Crimes in Border Areas: Batam City Case Study, *BIO Web of Conferences*, Vol. 70, hh. 1–13.
- Sutikno, A. N., 2020, “Bonus Demografi di Indonesia”, *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Vol. 12, No. 2, hh. 421–438.
- Syafar, M., 2017, “Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial”, *Lembaran Masyarakat : Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, hh. 282.
- Umar, M. A., 2017, “Bonus Demografi Sebagai Peluang Dan Tantangan Di Era Otonomi Daerah,” *Genta Mulia*, Vol. 8, No. 2, hh. 90–99.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Wirawan, V., 2022, “Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi (Suatu Kajian Filsafat): Pemahaman Bagi Mahasiswa UNJAYA, UNIMUGO dan UMK”, *Abdi Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, hh. 14–22.
- Yusuf, N., T.S.Handayani, dan A.P.Wibowo, 2022, “Peran Masyarakat dalam Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Kecamatan Blimbing Kota Malang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, hh. 5055–5060.
- Yuwantika, U., 2022, “Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era”, *Journal of Creativity Student*, Vol. 7 No. 2, hh. 133–154.